

Peluang dan Tantangan Pertumbuhan UKM/UMKM di Era dan Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi NTB

HARTINA

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB

hartinantb@gmail.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang bermula sejak 24 Maret 2020 di Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak saja membawa dampak terganggunya sistem dan manajemen kesehatan publik, tetapi juga berdampak luas pada sektor ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menyelamatkan dan membangkitkan keterpurukan UKM/UMKM, saat berlangsungnya Pandemi Covid-19, dilihat dari peluang dan tantangan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan diskriptif kualitatif berupa penggunaan data primer hasil wawancara dengan informan kunci serta pengolahan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi, selanjutnya dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Beberapa kesimpulan antara lain, UKM/UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, karena dengan jumlah UKM/UMKM sebanyak 64,2 jt, UKM/UMKM dapat berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 % dan menyerap tenaga kerja sebanyak 97 % serta menciptakan investasi sebesar 60,4 %. Berikutnya adalah tumbuhnya peluang fasilitasi bagi UKM/UMKM lokal saat pandemi Covid-19 untuk terlibat dalam kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) melalui penyediaan paket bantuan JPS NTB Gemilang bagi masyarakat terdampak. Partisipasi UKM/UMKM yang dilibatkan dalam menyediakan paket JPS NTB Gemilang tersebut yaitu tahap I sebanyak 150 UKM/UMKM, tahap II sebanyak 650 UKM/UMKM dan tahap III sebanyak 4.673 UKM/UMKM. Selain menguji pelibatan UKM/UMKM, meneliti juga pengorganisasian dalam penentuan sasaran dan distribusi yang menerapkan pola terintegrasi, kolaborasi serta pembagian peran antar pihak. Sedangkan tantangan dalam menjaga pertumbuhan UKM/UMKM adalah menjaga mutu dan standar produk serta perluasan pasar.

Kata kunci : Pola terintegrasi, Kolaborasi, Usaha Kecil Menengah

Abstract

The COVID-19 pandemic, which began on March 24, 2020 in West Nusa Tenggara (NTB), not only had an impact on the disruption of the public health system and management, but also had a broad impact on the economic sector. This paper aims to find out more about the efforts of the West Nusa Tenggara (NTB) Provincial Government in rescuing and resurrecting the downturn of MSMEs/SMEs, during the Covid-19 Pandemic, in terms of opportunities and challenges.

The research was conducted with a qualitative descriptive approach in the form of using primary data from interviews with key informants and processing secondary data collected through the documentation method, then analyzed to produce conclusions. Some conclusions include, MSMEs/SMEs have a strategic role in the Indonesian economy, because with the number of MSMEs/SMEs as many as 64.2 million, MSMEs/SMEs can contribute to GDP by 61.7% and absorb 97% of workers and create investment of 60.4%. Next is the growth of facilitation opportunities for local MSMEs/SMEs during the Covid-19 pandemic to be involved in social safety net policies through the provision of the JPS NTB Gemilang assistance package for affected communities. The participation of MSMEs/SMEs involved in providing the JPS NTB Gemilang package is stage I as many as 150 MSMEs/SMEs, stage II as many as 650 MSMEs/SMEs and stage III as many as 4,673 MSMEs/SMEs. In addition to testing the involvement of MSMEs/SMEs, it also examines the organization in targeting and distribution that applies an integrated pattern, collaboration and division of roles between parties. Meanwhile, the challenge in maintaining the growth of MSMEs/SMEs is maintaining product quality and standards as well as market expansion.

Keyword : Integrated pattern, Collaboration, Small Medium Enterprises (SME)

PENDAHULUAN

Pandemi virus Corona yang terjadi pada akhir 2019 yang lalu tidak hanya sekedar membawa bencana kesehatan, namun virus yang dikenal sebagai Covid-19 ini telah menimbulkan dampak pula di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat pelaku UKM/UMKM di Indonesia sangat gelisah dan sebagian malah terpapar. Virus ini juga tidak hanya membawa masalah pada sisi kesehatan dan sosial saja, namun sendi-sendi ekonomi juga turut dirusak yang pelakunya kemudian merasakan dampak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tercatat minus 5,32% (Jawahir. R, 2020), aktivitas impor juga menurun 3,7% dan pemutusan hubungan kerja sepihak disertai dengan meruginya industri padat karya (Hanoatubun. S, 2020). Dampak paling parah dari virus ini dirasakan oleh bisnis sektor pariwisata dan transportasi (Bambang P, 2020, May.10) serta perlahan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) ikut terdampak.

Salah satu sektor yang paling terpuak adalah Usaha Kecil Menengah (UKM). OECD, dalam Rahutami.A.I, 2021 menyatakan bahwa pandemi COVID-19 memukul UMKM lebih dari kondisi krisis keuangan 2008. Risiko yang dihadapi UMKM berupa penurunan daya beli masyarakat dan terjadinya krisis menyebabkan tidak lebih dari 50 persen UKM yang dapat bertahan. Akibatnya UKM secara luas dapat berdampak pada kondisi ekonomi nasional dan global.

Padahal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia telah berkembang dengan pesat dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Perkembangan dan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun

sebagian besar negara berkembang memiliki proporsi tertinggi dibandingkan dengan total usaha yang ada di negara yang bersangkutan (Erdem & Erdem dalam Saddewisasi. W, .2021). UMKM Indonesia berkontribusi terhadap perekonomian baik dalam jumlah usaha, penyediaan lapangan kerja, pembentuk pendapatan nasional, sumber ekspor non migas dan investasi. Selain itu UMKM juga berfungsi sebagai penyedia jaring pengaman atau berfungsi sosial yaitu sebagai wahana kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada kondisi krisis ekonomi UMKM juga mampu memberikan kontribusinya pada perkembangan ekonomi nasional (Putra, dalam Saddewisasi.W, 2021).

Berbeda dengan masa krisis ekonomi, dimasa pandemi Covid-19 UMKM mengalami penurunan baik dalam omset penjualan, jumlah konsumen bahkan usahanya tidak laku. Usaha kecil merupakan usaha yang sangat terdampak pandemi Covid19 dan mengakibatkan kebangkrutan (Baker & Judge,dalam Saddewisasi.W, 2021).

Kondisi yang disampaikan oleh Baker & Judge diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi di NTB, yaitu banyak UKM/UMKM yang kini terpuruk. Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun telah menyebabkan pendapatan UMKM di NTB anjlok. Omzet mereka turun drastis lantaran permintaan yang menurun drastis pula. Imbasnya kemudian berpengaruh pula pada daya beli. (Herawati, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan pula banyaknya karyawan yang di PHK. Pada kesempatan lain Kusuma, W menekankan kembali bahwa dampak covid-19 terhadap UKM/UMKM adalah menurunnya omset, karyawan di PHK, akses pemasaran terbatas, kemampuan produksi terganggu serta kredit macet.

Pernyataan Kusuma, W diatas sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB triwulan III tahun 2020 (year on year) berkontraksi 1,11 persen. Namun jika dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,01 persen. Secara kumulatif, mulai triwulan I hingga triwulan III tahun 2020, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami akselerasi positif sebesar 0,13 persen.(BPS, 2020).

Demikian pula dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka bulan Agustus 2020 di Provinsi NTB tercatat sebesar 4,22%, lebih tinggi dibandingkan TPT Agustus 2019 yang sebesar 3,28%. Ditinjau dari tempat tinggal, TPT baik di pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan pada periode Agustus 2020. Peningkatan TPT diperkirakan sejalan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan atau di-PHK akibat dampak pandemi. (Perwakilan BI Prov. NTB, 2021). Mendukung kondisi diatas, berdasarkan data dari direktori IKM/UMKM (2020) dinyatakan bahwa tenaga kerja yang terserap oleh keberadaan UKM/UMKM pada tahun 2019 sebesar 1.695.000 pekerja dari 645.000 unit UKM/UMKM atau 71.01 % dari 2,387 Jt tenaga kerja tersedia. Sedangkan diawal 2020 hampir keseluruhan UKM/UMKM tersebut terpuruk dan terdampak Covid-19.

Sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan, tingkat kesejahteraan di Provinsi NTB untuk periode September 2020 juga mengindikasikan adanya penurunan kinerja dibandingkan periode Maret 2020 dan September 2019. Angka kemiskinan per September 2020 tercatat sebesar 14,23%, meningkat dari periode Maret 2020 yang sebesar 13,97% dan periode September 2019 yang sebesar 13,88%. Kenaikan ini diperkirakan seiring dengan meningkatnya tekanan pada lapangan usaha dan penurunan kondisi ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19 (Perwakilan BI Prov. NTB, 2021).

Mendukung pernyataan Kusumajaye, sektor pariwisata mengalami dampak langsung berupa tingkat Hunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada September 2020 meningkat 4,88% dari 27,05% pada Agustus menjadi 31,93%. Jika dibandingkan dengan TPK hotel berbintang pada September 2019 mengalami penurunan sebesar 15,92% dari 47,85%. TPK hotel non bintang pada September 2020 hanya 16,89%, meningkat 0,20 poin dibandingkan 16,69% pada Agustus 2020. Jika dibandingkan dengan September 2019, mengalami penurunan 8,00 poin dari 24,89 persen (Hartina, 2021)

Berdasarkan uraian permasalahan diatas menunjukkan bahwa kondisi UKM/UMKM sangat terpuruk dan tidak beroperasi, tidak mampu menyerap tenaga kerja, sehingga membutuhkan intervensi stimulus dari pemerintah untuk menggerakkan kembali pelaku UKM/UMKM di NTB. Bidang usaha yang terdampak adalah usaha jasa, ekonomi kreatif, agribisnis dan perdagangan.

Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangkitkan UKM/UMKM yang terpuruk sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangkitkan UKM/UMKM yang terpuruk sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, dilihat dari peluang dan tantangan.

Berbagai tulisan terkait dengan pandemi Covid-19 dan UMKM di era pandemi Covid antara lain yang dilakukan oleh Satila, S. et all dengan judul: Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Industri Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan Menggunakan Statistika Deskriptif - Korelasi dan Regresi Linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi pandemi yang berkepanjangan memaksa para pelaku IKM Bangka Belitung kehilangan pendapatan hingga mencapai 70% karena turunnya daya beli masyarakat.

Peneliti lain dilakukan oleh Hartina, 2021. dengan judul: Pemberian Stimulus Ekonomi JPS Gemilang pada Era Pandemi COVID-19 di Provinsi NTB Tahun 2020 Ditinjau Dari Pelaksanaan Koordinasi dan Kolaborasi. Hasilnya adalah penerapan koordinasi dan *collaborative governance* sangat tepat diterapkan dalam penanganan Covid-19.

Disamping kedua peneliti diatas, Alfin, Ahmad, 2021. melakukan kajian dengan judul: Analisis Strategi UMKM dalam Menghadapi Krisis di era Pandemi Covid-19, hasil penelitian ini adalah strategi yang bisa dilakukan pelaku usaha diantaranya melakukan penjualan secara E-commerce, melakukan pemasaran secara digital, memperbaiki kualitas produk dan layanan, serta menjalin hubungan baik dengan konsumen atau menjalin hubungan pemasaran pelanggan. Hasil penelitian bisa dilakukan oleh pelaku usaha mengingat terjadinya perubahan kondisi dan diharapkan pelaku usaha bisa bertahan.

Rahurani, A.I, 202, melakukan penelitian denan lokus Asia Tenggara, beliau mengambil judul tentang COVID-19 dan Respon Usaha Kecil Menengah di Asia Tenggara. Hasilnya adalah Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi COVID-19. Perekonomian mengalami kemunduran yang dalam. UKM merupakan salah satu sektor yang paling terpuakul karena memiliki kapasitas bisnis yang kecil. Di sisi lain COVID-19 telah mempercepat peralihan ke teknologi digital. ASEAN yang sebagian besar sektor ekonominya merupakan UKM, perlu memanfaatkan dan mendorong kerjasama regional melalui ACCMSME.

Memperhatikan hasil penelitian dari keempat penelitian terdahulu di atas, maka terlihat bahwa pada keempat penelitian menunjukkan perbedaan fokus, dan bahasan terkait penyelesaian terhadap dampak covid-19 terhadap kondisi UKM/UMKM. Penelitian terdahulu tersebut secara umum memberikan simpulan bahwa: perekonomian mengalami kemunduran yang dalam dan UKM adalah yang paling terdampak karena skala bisnisnya kecil, terjadi penurunan pendapatan sebesar 70 % sebagai dampak pandemi Covid-19 terhadap UKM/UMKM, *Collaborative Governance* tepat digunakan dalam penanganan COVID-19. . Terkait hasil penelitian terdahulu tersebut, maka pada tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam membangkitkan UKM/UMKM yang terpuruk sebagai dampak dari pandemi covid - 19. pemerintah menghendaki agar IKM/UMKM dikelola secara terpadu, lebih terintegrasi dan lebih maju. Disamping itu menjadikan UKM/UMKM berdaulat dirumahnya sendiri, lebih percaya diri menjajakan produknya dipasar terbuka, menciptakan lapangan kerja serta harus mampu memproduksi secara berkelanjutan sehingga mampu menggerakkan perekonomian kerakyatan, padahal kondisi UKM/UMKM sedang terpuruk, akses pasar terbatas, penurunan omset serta kemampuan produksi terganggu. (Simpulan tidak perlu ditulis di Pendahuluan, kalau mau dimasukkan buat secara singkat dan global menurut bahasa sendiri)

METODE

Ruang Lingkup.

Ruang lingkup tulisan ini khusus membahas tentang pertumbuhan UKM/UMKM di era dan paska pandemi Covid-19 di provinsi NTB tahun 2020. Pertumbuhan UKM/UMKM maksudnya adalah bagaimana upaya pemerintah

membangkitkan UKM/UMKM dalam kondisi terpuruk untuk mensukseskan program JPS Gemilang melalui upaya terpadu dan menjadikannya berdaulat dirumah sendiri. Pemberdayaan UKM/UMKM sebagai upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mampu menciptakan lapangan kerja serta mampu memproduksi secara berkelanjutan. (Metodologi tidak perlu ada penjelasan seperti kalau mau dimasukkan bisa dijelaskan ke dalam prosedur/tata cara penelitian bagaimana?)

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (lawannya eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini akan menggunakan referensi sebagai penguat justifikasi yang dihasilkan dengan pendekatan kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Tulisan ini menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan. Sementara itu, data sekunder pada tulisan ini diperoleh dari telaah laporan-laporan, peraturan-peraturan dan sumber lain yang berkaitan dengan perkembangan UKM/UMKM di era dan paska COVID-19.

Informan diwakili oleh:

1. Asisten Sekretaris Daerah sebagai informan kunci program JPS Gemilang selaku ketua Gugus Tugas Sosial Ekonomi penanganan Covid-19.
2. Kepala Dinas Perindustrian untuk mengetahui perkembangan UKM/IKM

3. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
4. Koordinator UKM/UMKM penyedia produk lokal serta pelaku usaha

Teknik Pengumpulan

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada tulisan ini adalah wawancara, telaah dokumen (Sugiyono, 2020). Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis UKM/UMKM di Indonesia

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam siaran pers tanggal 5 mei 2021 menyatakan bahwa UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja.

Perhatian pemerintah untuk mendukung perkembangan UKM ditunjukkan oleh adanya kebijakan yang

mengatur tentang UMKM, antara lain: Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini menjadi acuan untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Peraturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur pengembangan usaha bisnis UMKM, kemitraan, perizinan bagi UKM, koordinasi dan pengendalian UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya UKM/UMKM bagi pemerintah Indonesia sehingga UKM/UMKM harus dikembangkan dan menjadi perhatian semua pihak, karena bila UKM/UMKM terpuruk maka jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat. Sebaliknya, jika UKM/UMKM beroperasi dengan baik, maka akan memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Peluang Pertumbuhan UMKM di NTB

Dalam rangka mengantisipasi dampak sosial akibat pandemi Covid-19 bagi masyarakat terdampak maka Pemerintah Provinsi NTB mengambil kebijakan untuk memberikan stimulus ekonomi berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Kebijakan terkait hal tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur. JPS Gemilang merupakan bantuan berupa sembako serta suplemen dan masker yang dikemas dalam bentuk paket untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak. Isi paket tersebut harus berupa produk hasil produksi UKM/UMKM lokal bukan barang pabrikan. (Hartina, 2021).

Tujuan dari Pemerintah Provinsi NTB memberikan JPS Gemilang dengan isi paket berupa produk UKM/UMKM lokal tidak hanya untuk memberi bantuan sembako, namun yang utama adalah melakukan pemberdayaan UKM/UMKM lokal guna menghasilkan produk yang

akan dibagikan sebagai paket JPS. Kebijakan pemerintah tentang JPS Gemilang adalah:

1. JPS selain diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat sekaligus memberdayakan IKM dan UMKM.
2. Mengutamakan penggunaan produk lokal dan membeli barang yang diproduksi oleh IKM dan UMKM lokal untuk dibagikan kemasyarakat melalui JPS Gemilang.
3. Sebanyak mungkin melibatkan UKM/UMKM dan UMKM sehingga dapat menjaga siklus ekonomi lokal dan memberikan alternatif lapangan pekerjaan untuk warga.

Kebijakan bantuan JPS Gemilang dibagikan kepada masyarakat terdampak yang terbagi dalam tiga tahap penyaluran dalam kurun waktu selama tiga bulan. Jumlah penerima masing-masing tahap adalah: 1). Tahap I sebanyak 105.000 KK penerima; 2). Tahap II sebanyak 125.000 KK penerima dan 3). Tahap III sebanyak 120.000 KK penerima. (Hartina, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pokja sosial ekonomi gugus tugas penanganan Covid-19 dan berdasarkan data diatas dinyatakan bahwa pada tahap I terdapat 105.000 paket peluang bagi pelaku UKM/UMKM, tahap II 125.000 paket dan tahap III sebanyak 120.000 paket. Disamping berbicara jumlah paket, tersedia pula peluang penyediaan isi paket masing-masing tahap penyaluran:

Gambar 1: Jenis Produk Isi Paket JPS Gemilang Tahap I



Sumber: Pokja Sosial ekonomi Gugus Tugas Penanganan COVID-19

Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan bahwa Isi paket JPS Gemilang pada tahap I terdiri dari empat jenis sembako dan lima jenis suplemen masing-masing jenis terdiri dari 105.000 biji/bungkus.

Dalam rangka terwujudnya JPS Gemilang berbasis produk UKM/UMKM lokal maka dilakukan promosi dan sosialisasi secara masiv terutama oleh para pelaku UKM/UMKM yang masih beroperasi di era pandemi covid-19. Sosialisasi dan promosi yang intens dilakukan Gubernur NTB baik melalui media sosial maupun melalui pertemuan-pertemuan informal dengan para pihak.

Pada penyaluran tahap I, keterlibatan UKM/UMKM mencapai angka 150 pelaku usaha. Evaluasi terhadap penyaluran JPS Gemilang tahap I, belum memuaskan pemerintah karna keterlibatan pelaku usaha masih dianggap kecil dan belum mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu Gubernur mengambil langkah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak terutama perbankan, BPS dan Perguruan Tinggi serta pemerintah Kabupaten/kota guna melakukan analisis terhadap situasi ekonomi daerah.

Hasil kebijakan berkolaborasi tersebut dapat dilihat pada telaah dokumen suara NTB (18 Juni, 2020) menunjukkan BI Perwakilan NTB memperkirakan ekonomi NTB pada triwulan II tahun 2020 akan mengalami kontraksi minus 7,65%.

Untuk menekan kontraksi ekonomi yang begitu besar, pemerintah provinsi NTB menjalankan rekomendasi BI dan BPS yang sudah melakukan kajian. Rekomendasi BI dan BPS tersebut adalah agar masyarakat tetap memproduksi dan mempertahankan produksi di era pandemi. Maksud dari masyarakat memproduksi adalah agar UKM/UMKM terus beroperasi. Hal ini sejalan dengan maksud Gubernur untuk sebanyak mungkin melibatkan UKM/UMKM sehingga dapat menjaga siklus ekonomi lokal dan memberikan alternatif lapangan pekerjaan untuk warga. Realisasi dari kebijakan untuk meningkatkan produksi dan menjaga kontinuitas produksi UKM/UMKM maka diberi kemudahan akses modal oleh bank BPD Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha penjahit pakaian wanita Yuliana, mengatakan bahwa diawal covid -19 kami sangat kesulitan karena tidak pelanggan yang datang menjahit dan kami tidak mampu membayar karyawan. Apabila dirumahkan mereka tidak memiliki pencaharian lain dan bila tetap dipekerjakan maka kami tidak mampu membayar gaji karyawan. Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha ini adalah berinovasi untuk memproduksi masker. Demikian pula hasil wawancara dengan pelaku usaha, masih sebagai penjahit pakaian wanita yang tidak ingin disebut namanya mengatakan bahwa, kami melihat pasar ternyata terjadi kelangkaan

masker sehingga pelaku usaha untuk memproduksi masker, sehingga mampu menggerakkan usahanya dan membayar tenaga kerja yang dipekerjakan.

Berbeda dengan dua pelaku usaha diatas, kali ini wawancara dilakukan dengan pelaku usaha bidang kuliner, dikatakannya bahwa tidak ada aktivitas selama pandemi covid -19, sampai dengan hadirnya sahabat yang menjadi koordinator kami dilapangan yang mengajak untuk bersama-sama menyiapkan kue kering sebagai bagian dari isi paket JPS Gemilang. Karena kami bukan pelaku usaha kue kering, guna memenuhi spek yang diminta maka kami melakukan latihan bersama teman-teman untuk menyiapkan produk tersebut. Untuk mengantisipasi terhadap modal usaha, koordinator menyampaikan bahwa bahan-bahan akan disiapkan oleh koordinator sedangkan hanya memproduksi saja sesuai spek.

Langkah yang diambil Untuk mendapatkan kepastian terhadap informasi yang didapat dari pelaku usaha kuliner tersebut, kemudian dilakukan wawancara dengan koordinator penyedia kue kering yaitu ketua IKM Putri Rinjani, hasil wawancara membenarkan informasi yang diterima dan dijelaskannya telah

mengajak 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha terdampak guna bersama-sama menyiapkan kue kering untuk memenuhi kebutuhan kabupaten Lombok Tengah. Koordinator diberi akses modal oleh pemerintah sedangkan pasar tersedia yaitu sebagai pemasok kebutuhan isi paket JPS Gemilang.

Memperhatikan hasil wawancara dengan pelaku usaha yang berbeda tersebut diatas, menunjukkan bahwa para pelaku usaha yang bertahan dan berkembang adalah pelaku usaha yang memiliki kemampuan beradaptasi dan berinovasi, mampu memahami kebutuhan pasar, serta memiliki kemampuan bersinergi dan berintegrasi dengan para pihak. Pelaku usaha ini mengajak pula sesama pelaku usaha lainnya untuk melakukan penyesuaian diri dengan kondisi yang ada, agar mampu bertahan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rosita, R (2020) yang menyatakan bahwa UMKM yang mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi, misalnya yang tadinya menjual produk-produk tas dan baju kemudian merubah produknya menjadi jual masker kain adalah pelaku usaha yang bisa bertahan di era pandemi covid-19.

Gambar 2: Paket JPS Gemilang Tahap II sebanyak 125.000 paket



Sumber: Pokja Sosial ekonomi Gugus Tugas Penanganan COVID-19; Keputusan Pemerintah No. 400-468 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020

Berdasarkan Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa kebijakan isi paket

JPS Gemilang tidak harus sama antar pulau dan disesuaikan permintaan masyarakat serta keberadaan produk

setempat. Jumlah masing-masing jenis yang harus disiapkan oleh pelaku UKM/UMKM sebanyak 125.000 biji/bungkus.

Memperhatikan hasil wawancara dan komitmen pelaku usaha untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, serta kebijakan penyediaan jenis antar pulau, maka partisipasi pelaku UKM/UMKM pada JPS Gemilang tahap II meningkat menjadi 650 pelaku usaha. Peningkatan partisipasi pelaku usaha ini, membuat pemerintah melakukan terobosan-terobosan lain yang mampu memotivasi para pelaku usaha untuk berproduksi secara terus menerus. Upaya tersebut antar lain:

1. Membagi peran secara tegas dengan kabupaten/kota
2. Memberi peran sebesar-besarnya kepada kabupaten/kota untuk memberdayakan UKM/UMKM dalam
3. menyiapkan bahan isi paket JPS Gemilang
4. Memberi peran dan tanggung jawab kepada OPD penyedia produk
5. Memberi tanggung jawab kepada perbankan untuk mendekatkan dengan akses modal
6. Meningkatkan kerjasama dengan BPS, Perguruan tinggi dan Perbankan untuk melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan.

7. Melakukan bimbingan teknis dan manajemen kepada pelaku usaha.
8. Melakukan pemetaan bidang usaha para pelaku UKM/UMKM.

Dalam rangka memastikan berjalannya kebijakan tersebut Gubernur bersama anggota Forkompinda meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak terutama dengan para pihak. Sosialisasi secara masif dilakukan oleh dan dari para pelaku usaha kepada para pelaku usaha lainnya. Hasilnya sangat menakjubkan yaitu jumlah partisipasi UKM/UMKM diakhir masa JPS Gemilang yaitu pada penyaluran JPS Gemilang Tahap III mencapai angka 4.673 pelaku usaha UKM/UMKM. Capaian yang membuat terkesima para pihak. Memperhatikan angka partisipasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil memotivasi para pelaku usaha dan para pelaku usaha sangat percaya diri dalam berproduksi. Kata-kata kunci berdaulat dinegeri sendiri dan menembus pasar bebas adalah hal-hal yang mampu membangkitkan rasa percaya diri para pelaku usaha. Tidak cukup hanya kata kunci namun upaya nyata pemerintah dalam pembinaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas adalah hal lain yang mendukung timbulnya rasa percaya diri. Jumlah dan jenis unit usaha yang berpartisipasi pada penyediaan bahan paket JPS Gemilang panyaluran tahap III terlihat pada Gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3: Pemberdayaan UKM/UMKM pada JPS Gemilang Tahap III



Sumber: Pokja Sosial Ekonomi Gugus Tugas Penanganan COVID-19

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha UKM/UMKM dibanding UKM/UMKM pada penyaluran tahap II. Pelaku usaha ini sudah termotivasi dan percaya diri untuk selalu memproduksi untuk dicarikan pasar pasca JPS Gemilang.

Gubernur NTB mengatakan bahwa ada satu hal yang paling penting dari JPS Gemilang yaitu: tumbuhnya optimisme dan kepercayaan diri para pelaku IKM/UMKM kita. Optimisme dan rasa percaya diri ini sungguh tidak ternilai dengan uang. (Manggaukang, 2020)

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian tersebut tidak tiba-tiba hadir disaat UKM/UMKM terpuruk, terdapat intervensi kebijakan dan program pemberdayaan UKM/UMKM berupa:

1. Inkubasi bisnis dengan target 5.000 wirausaha baru dan penguatan start up (RPJMD 2019-2023)
2. Hilirisasi inovasi dan teknologi (STIP, IKM, SMK)
3. 10 sentra UMKM yang punya kampung digital PLUT DiskomUMKM NTB
4. Pembiayaan perbankan: keringanan akses modal bagi pelaku UKM/UMKM oleh Bank NTB Syariah

5. E-commerce dan online shop: pasar bertais.com, pesasnsayur.id, ishopntb.com
6. JPS Gemilang

Perkembangan pertumbuhan UKM/UMKM awal masa Pandemi Covid-19 sampai akhir Program JPS Gemilang adalah sebagai berikut:

1. 2018: 96.205 unit usaha
2. 2019: 645.000 unit usaha
3. 2020:
 - a. Penyaluran tahap I JPS Gemilang;
 - b. Penyaluran tahap I JPS Gemilang;
 - c. Penyaluran tahap I JPS Gemilang;

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa hampir keseluruhan UKM/UMKM 2019 terdampak dan secara perlahan bangkit dengan adanya program JPS Gemilang yang memaksa UKM/UMKM untuk beroperasi melalui berbagai intervensi dari pemerintah.

Tantangan Perkembangan UMKM ke Depan

Berdasarkan uraian diatas yang menyatakan bahwa perkembangan partisipasi UKM/UMKM dalam kurun waktu 3 bulan sangat signifikan yaitu dari 150 - 650 - 4.673 pelaku usaha. Hal ini menginformasikan kepada para pihak

bahwa UKM/UMKM sudah sangat siap untuk memproduksi secara kontinyu di pasar luas, apabila didukung dengan bahan baku dan pasar yang jelas serta akses permodalan.

Dengan gencarnya promosi yang dilakukan oleh para pihak terutama selama masa pandemi covid - 19, dan rasa optimisme yang tinggi dari pelaku UKM/UMKM, maka pertumbuhan UKM/UMKM yang akan beroperasi akan meningkat. Namun disisi lain pasar JPS Gemilang berakhir.

Mengantisipasi berakhirnya JPS Gemilang, maka langkah selanjutnya adalah memberikan stimulus ekonomi berupa sarpras untuk memperkuat posisi UKM/UMKM. Hal-hal yang menjadi tantangan ke depan adalah:

1. Tingkatkan mutu: kemampuan mempertahankan kualitas dan kontinyuitas produk
2. Perluas pasar: Kemampuan menghadapi era digitalisasi untuk menghadapi pasar luas
3. Manajemen usaha bagi para pelaku

Untuk menjawab hal tersebut maka:

1. UKM/UMKM harus naik kelas, bergerak ke arah industrialisasi. NTB memiliki produk seperti kopi, madu, tembakau, lobster, rumput laut, udang dan berbagai jenis hasil laut lainnya, keseluruhannya memiliki kualitas terbaik dengan potensi ketersediaan yang cukup dan lebih dari cukup untuk beberapa jenis produk yang siap dijual dengan jual tinggi dalam bentuk komoditas olahan. Bagaimana kita mengolah, mengemas dan dipasarkan.
2. Ketersediaan produk saja tidak cukup tanpa disertai dengan standarisasi produk. UKM/UMKM gagap bila berbicara tentang standarisasi mutu dan perluasan pasar. Untuk hal ini sangat perlu dilakukan penguatan dan

pendampingan yang sungguh-sungguh dari para pihak. Sehingga produk UKM/UMKM prioritas memiliki standar Nasional Indonesia (SNI).

3. Perluasan pasar yang berhubungan dengan inovasi dan kreativitas belum mampu dilakukan oleh pelaku UKM/UMKM namun harus ada intervensi pemerintah. Pemerintah telah memiliki terobosan berupa marketplace bernama NTB MALL yang memasarkan produk UKM/UMKM secara online. Untuk itu peningkatan kapasitas pelaku UKM/UMKM untuk bisa terlibat NTB MALL harus ditingkatkan.
4. Penyediaan bahan baku tidak dapat dilakukan oleh pelaku, pemerintah menggerakkan seluruh OPD hilir penghasil bahan baku untuk meningkatkan dan menjaga kontinyuitas bahan baku sehingga operasionalisasi UKM/UMKM terjaga.
5. Berbicara manajemen usaha membuat para pelaku usaha galau. Pendampingan dan penguatan kemampuan manajemen dapat dilakukan oleh para pihak yang berkompeten melalui fasilitasi oleh pihak pemerintah.

Peningkatan standar mutu dan perluasan pasar tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri namun harus bersinergi dengan perbankan, swasta, pengusaha besar, BUMN dan BUMD.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi di NTB

1. Memperkuat UMKM dan IKM. Stimulus ekonomi akan terus diberikan dalam jangka menengah dan panjang. Stimulus berupa dukungan modal usaha, jaringan pasar dan paket kebijakan yang mendorong UMKM dan IKM terus bergeliat dan naik kelas.
2. Mendorong industri olahan. Dukungan alat dan mesin olahan akan terus dilanjutkan. Industri olahan industri olahan di NTB harus terus dipastikan

tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Terutama industri olahan berbasis pertanian dalam pengertian luas. Termasuk perikanan dan peternakan di dalamnya.

3. Mengoptimalkan potensi ekonomi umat. Pesantren dan mesjid yang jumlahnya ribuan di NTB, harus menjadi pemain terdepan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi umat. Gerakan melawan dari mesjid atau Mawar Emas salah satu yang harus dipastikan menjadi gerakan yang nyata bukan hanya wacana.
4. Memastikan sektor pariwisata bergeliat cepat. Sektor unggulan NTB ini tidak boleh lama mati suri. Harus ada terobosan untuk membuatnya bergeliat kembali.

PENUTUP

Kesimpulan

1. JPS Gemilang dengan menggunakan produk hasil IKM/UMK lokal sebagai isi paket JPS Gemilang adalah langkah tepat dalam membangkitkan kembali UKM/UMKM terdampak covid-19. Hal ini dibuktikan oleh peningkatan jumlah UKM/UMKM yang berpartisipasi selama program JPS Gemilang. Peningkatan UKM/UMKM adalah sebagai berikut: tahap I: 150 UKM/UMKM; tahap II: 650 UKM/UMKM; tahap III: 4.673 UKM/UMKM.
2. Pola koordinasi dan kolaborasi serta pembagian peran yang jelas antar pihak adalah salah satu langkah yang diterapkan dalam sukses memotivasi dan membangun rasa optimisme pelaku UKM/UMKM.
3. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pertumbuhan UKM/UMKM adalah peningkatan mutu dan kontinuitas produk serta perluasan pasar.

Saran

1. Untuk menjaga keberlangsungan operasional dan meningkatkan daya saing UKM/UMKM, sangat ditentukan oleh ketersediaan jumlah produk secara berkelanjutan, mutu produk yang tinggi, standar mutu yang memenuhi standar SNI dan perluasan peluang pasar. Diperlukan pendampingan dan penguatan manajemen oleh Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan perbankan, serta upaya perluasan pasar melalui berbagai strategi penetrasi pasar oleh Dinas Perdagangan Provinsi, termasuk kerjasama dengan platform jual beli online yang terpercaya dan sudah memiliki branding kuat.
2. Kontinuitas produk sangat tergantung pada jumlah ketersediaan bahan baku, mutu bahan baku dan keterjangkauan harga bahan baku agar produksi dapat terus berlangsung. Pemerintah perlu memberi kemudahan dan insentif pada usaha penyedia bahan baku untuk menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, BRIDA NTB
3. Peningkatan kapasitas UKM/IKM melalui pemanfaatan IT untuk desain produk, standarisasi dan perluasan pasar. Diperlukan pendampingan oleh Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfotik dan BRIDA Provinsi NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, Ahmada. 2021. ANALISIS STRATEGI UMKM DALAM MENGHADAPI KRISIS DI ERA

- PANDEMI COVID-19.
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya; Jl. Ahmad Yani.
Jurnal inovasi Penelitian (JIP)
Vol.1 no 8 januari 2021
- Bambang P. (2020, May.10).
Perekonomian Indonesia Pasca-
Pandemi Covid-19 [Online].
Available:
<https://money.kompas.com/read/2020/05/10/091500226/>
- Hartina. 2021. Pemberian Stimulus
Ekonomi JPS Gemilangpada Era
Pandemi Covid-19 di Provinsi
NTB tahun 2020. ditinjau dari
Koordinasi dan Kolaborasi.
Jurnal Widyaiswara Vol. 2 No. 3
Sept 2021.
- Hartina. 2021. Pemberian Stimulus
Ekonomi JPS Gemilangpada Era
Pandemi Covid-19 di Provinsi
NTB tahun 2020. ditinjau dari
Koordinasi dan Kolaborasi.
Karya Tulis Ilmiah. LAN RI.
Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Daerah
Provinsi NTB.
- Hernawardi, 2021. Pendapatan UMKM
NTB Anjlok.
<https://www.gatra.com/news-517889-ekonomi-covid-19-pendapatan-umkm-ntb-anjlok.html>
- KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA. 05 Mei
2021. UMKM Menjadi Pilar
Penting dalam Perekonomian
Indonesia. SIARAN PERS
HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05
/2021. diunduh pada tgl 1 maret
2022. j 21 wita
- Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB. 2021.
Laporan Perekonomian Provinsi
Nusa Tenggara Barata. 5 Maret
2021.
- Raba, manggaukang. 2020. Cara NTB
Dongkrak IKM dan UMKM di
Tengah Pandemi Covid-19.
Beemedia Nusantara. Mataram.
Nusa Tenggara Barat.
- Rahutami, A.I. 2021. COVID-19 DAN
RESPON USAHA KECIL
MENENGAH DI
ASIA TENGGARA. UMKM
Jejak, Aksi dan Solusi saat
Pandemi Covid-19. sebuah
Analogi Isei bagi Negeri.
- R Jawahir. (2020, Aug.11). Pandemi
Covid-19, Apa Saja Dampak
pada Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia [Online]. Available:
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-COVID-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>
- Rosit, Rahmi. 2020. PENGARUH
PANDEMI COVID-19
TERHADAP UMKM
DI INDONESIA. Jurnal Lentera
Bisnis DOI :
10.34127/jrlab.v9i2.380
Volume 9 No 2, November 2020
ISSN Cetak 2252-9993, ISSN
Online 2598-618X
109.
<https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/viewFile/380/316>
- S. Hanoatubun, "Dampak COVID-19
Terhadap Perekonomian
Indonesia", J. Education,
Psychology and Counseling, vol.
2, no. 1, pp. 146-153, Apr. 2020.
perekonomian-indonesiapasca-
pandemi-COVID-
19?page=al
- Satila, S. et all. 2021. Pengaruh Pandemi
Covid-19 terhadap Industri Kecil
dan Menengah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

dengan Menggunakan Statistika Deskriptif - Korelasi dan Regresi Linier. Jurnal Rekayasa Sistem dan Industri, vol 8 No. 01

Sugiyono, Prof. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Saddewisasi, W. PERKEMBANGAN UMKM, TANTANGAN DAN PELUANG MENJAGA EKSISTENSINYA DI ERA PANDEMI COVID-19. UMKM Jejak, Aksi dan Solusi saat Pandemi Covid-19. sebuah analogi Isegi bagi Negeri.

<https://diskop.ntbprov.go.id/materi-presentasi-kepala-dinas-koperasi-ukm-ntb-pada-rakor-dan-sinkronisasi-program-pemberdayaan-koperasi-dan-ukm-tahun-2021-di-provinsi-ntb/> diunduh pada 2 maret 2022 jam 7.45

